

SISTEM PENDIDIKAN INKLUSI DAN INTERVENSI UMUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Angelina Cindya Bella¹, Arbidin Bayhaqi², Irene Meilika Putri³, Esra Mariska Sianturi⁴, Destin Natali⁵, M.Adriansyah Pratama⁶, Fitri Mayuta⁷, Romiaty Romiaty⁸

¹angeelll210@gmail.com, ²bayhaqiabidin@gmail.com, ³irenemeilikaptr@gmail.com, ⁴esrasianturi097@gmail.com, ⁵destinnatalin@gmail.com, ⁶madriansyahpratama07@gmail.com, ⁷fitrimayuta9@gmail.com, ⁸romiaty@fkip.upr.ac.id

Universitas Palangka Raya

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen, including children with special needs, who require educational services tailored to their individual characteristics and needs. However, the implementation of inclusive education in Indonesia still faces various challenges, such as limited teacher understanding, inadequate facilities, and the lack of optimal integration between the education system and interventions provided. This study aims to analyze the education system for children with special needs and to examine general intervention strategies that support their development. The method used is a literature review by analyzing relevant scientific sources. The findings indicate that the education system for children with special needs has evolved from segregation to integration and inclusive models, although its implementation remains suboptimal. Furthermore, appropriate, planned, and individualized interventions play a crucial role in optimizing children's academic, social, and independence development. Therefore, collaboration among policymakers, educators, families, and communities is essential to improve the quality of educational services and interventions for children with special needs.

Keywords: *inclusive education, children with special needs, intervention*

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), yang memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Namun, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tenaga pendidik, keterbatasan sarana, serta belum optimalnya integrasi antara sistem pendidikan dan intervensi yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendidikan bagi ABK serta mengkaji bentuk intervensi umum yang dapat mendukung perkembangan mereka. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature review*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pendidikan ABK telah berkembang dari model segregasi, integrasi, hingga inklusi, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, intervensi yang tepat, terencana, dan sesuai kebutuhan individu sangat berperan dalam mengoptimalkan perkembangan akademik, sosial, dan kemandirian ABK. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan intervensi bagi ABK secara menyeluruh.

Kata Kunci: pendidikan inklusi; anak berkebutuhan khusus; intervensi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan peradaban bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Fau et al., 2023:71). Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, sehingga peserta didik diharapkan mampu menjadi individu yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab (Fau et al., 2023:71). Selain itu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga negara (Hamza et al., 2025:218). Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi, termasuk bagi individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun sosial (Aditama, 2025:105). Oleh karena itu, sistem pendidikan dituntut untuk mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik melalui pendekatan yang inklusi (Aditama, 2025:105).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan bagian dari peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda dan memerlukan layanan pendidikan yang khusus. ABK adalah anak yang mengalami perbedaan signifikan dalam aspek fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional dibandingkan dengan anak seusianya sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya (Ulfah, 2024:9). Selain itu, ABK juga dipahami sebagai individu yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan belajar dan interaksi sosial (Damanik et al., 2025:2). Anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan jenis kebutuhannya. Namun secara umum, mereka menunjukkan adanya hambatan dalam perkembangan akademik, sosial, dan/atau emosional. Selain itu, kemampuan adaptasi mereka cenderung lebih rendah, sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang disesuaikan secara individual (Arviana et al., 2025:875). Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk yang memiliki keterbatasan, berhak memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas (Damanik et al., 2025:2).

Menurut Llorent (2024), pendidikan inklusi hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran serta menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan terbuka bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi (Anwar et al., 2025:741). Akan tetapi, keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada adanya intervensi yang tepat dan terencana. Intervensi merupakan suatu tindakan yang dirancang secara sistematis untuk membantu mengatasi hambatan perkembangan serta mengoptimalkan potensi anak berkebutuhan khusus (Lestari, 2025:115). Strategi intervensi ini mencakup berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti terapi, penggunaan metode komunikasi yang tepat, pembinaan perilaku, serta layanan pendidikan khusus yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal integrasi antara sistem pendidikan dan intervensi yang diberikan kepada ABK. Banyak sekolah yang belum memiliki pemahaman dan strategi yang tepat dalam menangani kebutuhan individual ABK, sehingga potensi anak tidak berkembang secara maksimal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bentuk intervensi umum yang dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan pendidikan. Kondisi inilah yang menjadi alasan utama mengapa topik “Sistem Pendidikan Anak Inklusi dan Intervensi Umum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus” penting untuk dikaji. Kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem pendidikan yang tepat serta intervensi yang efektif dapat mendukung perkembangan ABK secara optimal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses SLR dilakukan dengan mengumpulkan literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang telah dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar teoritis yang kuat dalam mengembangkan praktik pendidikan yang lebih inklusif dan mampu merespons kebutuhan anak secara optimal (Damayanti et al.,

2025:74). Menurut Snyder (2019), literature review merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik tertentu (Saputra et al., 2025:110). Selain itu, metode ini berperan dalam memperkuat landasan teoritis penelitian, khususnya dalam menyusun argumen ilmiah yang kuat dan terstruktur terhadap permasalahan yang dikaji (Snyder, 2019, dalam Saputra et al., 2025:110).

Subjek dalam penelitian ini berupa sumber-sumber literatur yang terdiri atas 24 artikel ilmiah dan 1 buku yang relevan dengan topik penelitian. Artikel yang digunakan merupakan publikasi pada rentang tahun 2023–2025, sedangkan buku yang digunakan diterbitkan pada tahun 2019. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria inklusi, yaitu: (1) literatur membahas topik yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) artikel berasal dari jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan pada periode 2023–2025; (3) artikel tersedia dalam teks lengkap (full text); dan (4) memuat data, konsep, atau hasil penelitian yang mendukung pembahasan. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian; (2) artikel yang terpublikasi di luar rentang tahun yang telah ditentukan; serta (3) artikel yang tidak menyediakan informasi yang memadai untuk dianalisis. Alur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi literatur, yaitu penelusuran artikel dan buku melalui berbagai sumber ilmiah yang relevan. Tahap kedua adalah seleksi literatur, yaitu menyaring sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah evaluasi literatur, yaitu menelaah kualitas, relevansi, serta kontribusi setiap sumber terhadap topik penelitian. Tahap keempat adalah ekstraksi dan analisis data, yaitu mengumpulkan informasi penting dari setiap literatur, mengelompokkan temuan-temuan yang serupa, kemudian menganalisisnya secara deskriptif. Tahap terakhir adalah sintesis hasil kajian, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur yang telah dianalisis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk memahami bahwa kajian mengenai anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari konsep dasar

hingga praktik penanganannya dalam dunia pendidikan. Hal ini karena keberhasilan layanan pendidikan bagi ABK sangat ditentukan oleh pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik anak, landasan kebijakan yang mendukung, sistem pendidikan yang diterapkan, serta bentuk intervensi yang diberikan secara tepat dan berkelanjutan.

Konsep Dasar Anak Berkebutuhan

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak seusianya (Depdiknas, 2004, dalam Mardiansah et al., 2024:165). Perbedaan ini menjadi indikator bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang unik sehingga memerlukan perhatian khusus dari lingkungan sekitarnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada berbagai aspek, seperti fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional (Depdiknas, 2004, dalam Mardiansah et al., 2024:165). Keberagaman aspek ini menunjukkan bahwa kondisi ABK tidak dapat disamaratakan dan harus dipahami secara menyeluruh agar penanganannya tepat. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu (Depdiknas, 2004, dalam Mardiansah et al., 2024:165). Layanan tersebut dapat berupa metode pembelajaran yang adaptif, penggunaan media khusus, serta pendampingan dari tenaga profesional agar potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Lebih lanjut, anak berkebutuhan khusus juga dipahami sebagai individu yang memiliki keterbatasan atau kelainan yang berdampak signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangannya (Daud, 2025:17). Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan anak dalam mencapai keberhasilan dalam bidang akademik, sosial, maupun perkembangan pribadi. Menurut Prof. Frieda Mangunsong, anak yang termasuk dalam kategori luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan signifikan dalam aspek-aspek penting fungsi kemanusiaan. Perbedaan tersebut dapat berupa hambatan fisik, psikologis, kognitif, maupun sosial yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mencapai kebutuhan, tujuan, dan potensi secara optimal. Kelompok ini mencakup anak dengan gangguan pendengaran, penglihatan, bicara, kondisi fisik tertentu, keterbatasan intelektual, serta gangguan emosional. Selain itu, anak dengan kecerdasan tinggi juga termasuk dalam kategori ini karena membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional (Hidayat et al., 2023:84). Tanpa adanya

intervensi yang tepat, hambatan tersebut dapat semakin memperbesar kesulitan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita merupakan anak yang mengalami gangguan dalam perkembangan kognitif dan intelektual di bawah rata-rata anak seusianya sehingga mengalami kesulitan dalam belajar, interaksi sosial, dan kemandirian (Maranata et al., 2023, dalam Meidiana et al., 2025:3).

Anak Tunarungu

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian maupun seluruhnya, akibat gangguan pada fungsi pendengaran (Nugraheni & Pudjiastuti, 2023:77).

Anak Tunawicara

Anak tunawicara merupakan anak yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal karena adanya gangguan pada organ bicara (Akhmad et.al., dalam Wulandari et al., 2025:10).

Anak Tunanetra

Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian (low vision) maupun sepenuhnya (blindness) (Sianturi et al., 2024:3).

Anak Tunadaksa

Anak tunadaksa merupakan anak yang memiliki kelainan pada sistem otot, tulang, persendian, atau saraf yang memengaruhi kemampuan gerak tubuh (Dewi & Sartinah, 2023:81).

Anak Tunalaras

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dalam emosi dan perilaku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan (Amalia & Nadirah, 2025:426).

Anak Berkesulitan Belajar

Anak berkesulitan belajar merupakan individu yang mengalami gangguan dalam proses psikologis dasar yang memengaruhi kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau keterampilan akademik lainnya (Ginting et al., 2023:139).

Anak Cerdas dan Berbakat

Anak cerdas dan berbakat adalah individu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam satu atau lebih bidang seperti intelektual, kreativitas, seni, atau kepemimpinan (Makane et al., 2025:364).

Anak Autism Spectrum Disorder (ASD)

Anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan individu yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan kesulitan dalam komunikasi sosial serta pola perilaku yang terbatas dan berulang (Setiyani et al., 2024:46).

Anak Tunaganda

Anak tunaganda merupakan anak yang memiliki lebih dari satu jenis kelainan atau hambatan perkembangan secara bersamaan (Hidayat et al., 2023:8).

Kerangka dan Regulasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia muncul sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan nasional cenderung menggunakan pendekatan homogen, di mana peserta didik dianggap memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus seringkali tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal atau hanya ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang bersifat segregatif. Padahal, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (Anwar et al., 2025:740).

Secara global, berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994), Konvensi Hak Anak (MacPherson, 1989), serta Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Nations, 2007) telah mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem pendidikan inklusif, yaitu sistem yang memungkinkan semua anak belajar bersama tanpa adanya diskriminasi. Indonesia merespons hal ini melalui kebijakan nasional, salah satunya Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang menjadi tonggak awal formalisasi pendidikan inklusi (Supena et al., 2018). Regulasi tersebut menegaskan bahwa sekolah reguler dapat dan seharusnya menerima peserta didik

berkebutuhan khusus dengan dukungan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik yang kompeten secara pedagogis (Anwar et al., 2025:740).

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang ada belum sepenuhnya didukung oleh standar layanan minimal, sistem insentif bagi sekolah, maupun mekanisme evaluasi berbasis data yang terstruktur. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lanjutan seperti PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Indonesia, 2020), serta program seperti Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal, karena hanya sebagian kecil sekolah yang benar-benar menerapkan prinsip inklusivitas secara menyeluruh, baik dalam penerimaan peserta didik, penerapan kurikulum diferensiatif, peningkatan kompetensi guru, maupun penyediaan fasilitas yang aksesibel (Anwar et al., 2025:740).

Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara, khususnya anak berkebutuhan khusus, agar memperoleh layanan pendidikan yang setara, berkualitas, dan bebas dari diskriminasi (Abd.Kadir, 2015; Husna et al., 2019). Tujuan tersebut diarahkan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik, baik dari aspek kemampuan, latar belakang sosial, maupun kondisi fisik dan mental, melalui pendekatan yang adil, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan individu.

Menurut UNESCO (2009, dalam Anwar et al., 2025:740-741). Secara lebih rinci, tujuan kebijakan pendidikan inklusif meliputi :

- a. Menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk ABK, pada semua jenjang pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas, kurikulum, dan tenaga kependidikan yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik;
- c. Mendorong perubahan paradigma pendidikan dari sistem segregatif menuju sistem inklusif yang menjunjung tinggi kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman;
- d. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola pembelajaran inklusif yang responsif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik; serta memperkuat peran serta masyarakat dan keluarga dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah regular.

Adapun sasaran dari kebijakan pendidikan inklusif menurut Abd Kadir (2015, dalam Anwar et al., 2025:741) meliputi beberapa pihak, yaitu:

- a. Peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), yang diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran secara maksimal bersama teman sebaya dalam lingkungan yang kondusif dan menunjang perkembangan mereka secara optimal;
- b. Satuan pendidikan reguler agar mampu memberikan layanan inklusif melalui perbaikan sistem pembelajaran, manajemen, dan infrastruktur;
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif secara profesional;
- d. Pemerintah pusat dan daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan anggaran, regulasi teknis, serta pengawasan kebijakan; serta
- e. Masyarakat dan organisasi sosial sebagai mitra dalam menciptakan lingkungan yang inklusi dan ramah bagi anak.

Dalam proses perumusan dan implementasinya, terdapat berbagai aktor yang berperan penting dalam kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia (Indonesia, 2020; Juntak et al., 2023). Pertama, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berperan dalam menetapkan kebijakan, regulasi, serta pengalokasian anggaran dan pelatihan tenaga pendidik. Kedua, pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di wilayah masing-masing, termasuk penetapan sekolah inklusif dan penyediaan tenaga pendidik khusus. Ketiga, sekolah sebagai pelaksana utama yang melakukan penyesuaian kurikulum, penyediaan fasilitas, dan penerapan strategi pembelajaran inklusi (Anwar et al., 2025:741).

Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan memiliki peran sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi, sehingga memerlukan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, keluarga dan orang tua berperan penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak, baik sebagai pendukung emosional maupun sumber informasi mengenai kebutuhan khusus anak. Organisasi masyarakat sipil dan LSM juga turut berkontribusi melalui advokasi, pelatihan, serta pemantauan kebijakan. Di sisi lain, akademisi dan peneliti memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah dan pengembangan pendekatan pembelajaran yang berbasis bukti. Tidak kalah penting, lembaga internasional seperti UNICEF dan UNESCO berperan dalam memberikan dukungan pendanaan dan asistensi teknis. Kolaborasi antar berbagai pihak tersebut menjadi faktor

kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusi, dan menghargai keberagaman (Anwar et al., 2025:741).

Pendidikan inklusi sendiri merupakan pendekatan yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Oleh karena itu, pendidikan inklusif tidak hanya dipandang sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai strategi nasional dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Implementasi pendidikan inklusi bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran serta menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan terbuka bagi semua peserta didik tanpa adanya diskriminasi (Llorent et al., 2024, dalam Anwar et al., 2025:741).

Sistem Pendidikan Inklusi

Model Segregasi

Model segregasi berasal dari kata *segregate* yang berarti memisahkan atau mengucilkan, serta dapat dimaknai sebagai proses pemisahan atau pengelompokan individu maupun kelompok tertentu dari yang lain untuk tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, segregasi merujuk pada sistem pendidikan khusus yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari anak pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia. Dalam penerapannya, pemisahan tidak hanya terjadi pada tempat belajar, tetapi juga mencakup waktu, strategi, metode, model, serta program pembelajaran. Program pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dirancang berbeda dari sekolah reguler, dengan tujuan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Penerapan sistem ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa anak berkebutuhan khusus akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran bersama anak lainnya, baik dalam memahami materi maupun dalam proses belajar. Selain itu, ada pula kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perundungan dari teman sebaya. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus dianggap perlu mendapatkan layanan pendidikan yang terpisah dari anak-anak pada umumnya. Dari sinilah berkembang

konsep pendidikan luar biasa yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Akbar et al., 2024:56).

Model Integrasi

Model integrasi secara bahasa berarti penyatuan atau pembauran berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam bidang pendidikan, integrasi merujuk pada sistem pendidikan terpadu yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya dalam satu kelas dan satu sekolah yang sama.

Menurut Latifah (2020, Akbar et al., 2024:57-58) terdapat tiga bentuk layanan dalam pendidikan integrasi.

Kelas Reguler

Pertama, kelas reguler, di mana anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran secara penuh bersama siswa lain dengan menggunakan kurikulum yang sama. Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penyesuaian dalam metode pengajaran dan penilaian, serta dukungan dari guru kelas atau guru mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran tertentu, seperti matematika, menggambar, dan menulis, perlu disesuaikan dengan kondisi anak, misalnya bagi anak tunanetra.

Kelas Reguler dengan Ruang Bimbingan Khusus

Kedua, kelas reguler dengan ruang bimbingan khusus. Pada model ini, anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lain di kelas biasa, tetapi juga mendapatkan layanan tambahan di ruang khusus untuk mata pelajaran tertentu yang sulit diikuti secara bersama. Layanan ini diberikan oleh guru pembimbing khusus sesuai kebutuhan anak.

Kelas Khusus

Ketiga, kelas khusus yang juga dikenal sebagai keterpaduan lokal atau sosial. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas tersendiri dengan program yang dijalankan oleh guru pembimbing khusus, menggunakan pendekatan, metode, dan sistem penilaian seperti di Sekolah Luar Biasa (SLB). Keterpaduan yang terjadi lebih bersifat fisik dan sosial, di mana anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dengan siswa lain dalam kegiatan non-akademik, seperti olahraga, keterampilan, dan interaksi saat waktu istirahat.

Model Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang berupaya mentransformasi sistem pendidikan dengan menghilangkan berbagai hambatan yang

menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran. Pendidikan ini menjadi bagian dari pendidikan berkualitas berbasis hak asasi manusia, yang menekankan kesetaraan dalam akses, partisipasi, serta respons positif terhadap kebutuhan belajar individu dan pengembangan kompetensi seluruh peserta didik. Dalam pendidikan inklusif, pendekatan yang digunakan berpusat pada anak (*child-centered*), di mana sistem pendidikan dituntut untuk beradaptasi terhadap kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada keterbatasan anak berkebutuhan khusus (ABK), tetapi juga menekankan pada pengembangan potensi dan kelebihan yang dimiliki setiap individu secara menyeluruh (Akbar et al., 2024:59).

Pendidikan inklusi juga merupakan suatu proses yang dirancang secara terencana dan sistematis dalam memberikan layanan kepada ABK bersama dengan teman sebaya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman serta mempersiapkan anak dan lingkungan sosialnya untuk saling memahami dan menghargai keberadaan ABK. Semakin dini penerimaan masyarakat terhadap ABK, maka semakin mudah bagi mereka untuk beradaptasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Dalam implementasinya, pendidikan inklusi memiliki beberapa model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik ABK maupun non-ABK. Model pertama adalah kelas reguler, di mana ABK yang tidak memiliki hambatan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya secara penuh sehingga memungkinkan interaksi sosial yang intensif (Akbar et al., 2024:59).

Dalam implementasinya, pendidikan inklusi memiliki beberapa model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik ABK maupun non-ABK (Akbar et al., 2024:59-60).

Kelas Reguler,

Di mana ABK yang tidak memiliki hambatan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya secara penuh sehingga memungkinkan interaksi sosial yang intensif.

Model *Cluster*

Yaitu pengelompokan ABK dalam satu kelompok khusus meskipun masih berada dalam satu ruang kelas dengan siswa lainnya. Pada model ini, interaksi ABK cenderung terbatas karena mereka mendapatkan pendampingan khusus dari guru pendamping.

Model *Pull Out*

Yaitu kombinasi antara pembelajaran di kelas reguler dan layanan khusus. Dalam model ini, ABK mengikuti pembelajaran bersama siswa lain, namun pada waktu tertentu mereka dipisahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan.

Model Gabungan antara *Cluster* dan *Pull Out*

Di mana ABK belajar dalam kelompok khusus di dalam kelas reguler, tetapi juga secara berkala mengikuti pembelajaran di ruang khusus untuk mendapatkan intervensi yang lebih spesifik.

Model Kelas Khusus,

Yaitu sekolah menyediakan ruang kelas tersendiri bagi ABK. Meskipun demikian, pada kegiatan tertentu ABK tetap dapat bergabung dengan siswa reguler, meskipun intensitas interaksinya relatif terbatas.

Intervensi Terhadap ABK

Secara umum, intervensi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghentikan, mengubah, atau memperbaiki suatu kondisi tertentu. Intervensi dapat berupa bentuk penanganan atau *treatment* yang bertujuan untuk mengendalikan maupun mengubah proses terjadinya gangguan atau masalah (APA, 2020). Selain itu, intervensi juga dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan hasil asesmen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi individu, kelompok, atau masyarakat, serta mencegah agar masalah tidak menjadi lebih buruk. Intervensi dapat bersifat pencegahan (preventif) maupun penanganan (kuratif) (HIMPSI, 2010). Dalam konteks Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), intervensi merupakan bentuk layanan atau penanganan yang diberikan kepada anak yang berisiko mengalami hambatan perkembangan, baik dalam aspek motorik, komunikasi dan bahasa, sosial-emosional, kognitif, maupun persepsi sensori (Hasbi et al., 2019:9).

Menurut Hasbi dkk (2019:10) tujuan intervensi ABK yaitu program intervensi dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan khusus serta karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus (ABK), pelaksanaan intervensi bagi ABK mengacu pada

sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini, ABK perlu mengembangkan kemampuan penyesuaian diri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, ABK memerlukan dukungan untuk mengoptimalkan potensi yang masih dimiliki, intervensi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, membantu anak mampu merawat diri, serta membekali mereka agar memiliki kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, intervensi bagi ABK berlandaskan pada prinsip normalisasi, pendekatan individual, serta dilakukan dalam lingkungan terdekat anak, pelaksanaan intervensi menggunakan berbagai pendekatan dan teknik yang sesuai, intervensi berfokus pada pemberdayaan anak dan/atau keluarga dengan memanfaatkan potensi, sumber daya, dan kekuatan yang ada untuk mengatasi permasalahan.

Strategi Intervensi ABK

Menurut Putranto (2015, dalam Pradana & Susilawati, 2023:32), mengemukakan bahwa strategi intervensi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) perlu disesuaikan dengan jenis kebutuhan yang dimiliki setiap anak. Setiap kategori memiliki pendekatan intervensi yang berbeda agar dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Secara rinci, menurut Pradana & Susilawati (2023:32) strategi intervensi tersebut meliputi:

Autisme

Intervensi dilakukan melalui berbagai jenis terapi, seperti terapi ABA (*Applied Behavior Analysis*), terapi wicara, terapi okupasi, terapi fisik, terapi sosial, terapi bermain, terapi perilaku, terapi perkembangan, terapi visual, terapi biomedis, serta terapi musik

Tunarungu

Strategi yang digunakan antara lain pendekatan auditori verbal dan pendekatan auditori oral untuk membantu anak dalam memahami dan menggunakan bahasa.

Tunawicara

Intervensi dilakukan dengan cara berbicara secara jelas dan tepat, menggunakan kalimat sederhana dan singkat, memanfaatkan komunikasi melalui gerakan bibir atau tangan, melakukan komunikasi secara tatap muka, serta menggunakan media tulisan.

Tunalaras

Penanganan dilakukan melalui layanan pendidikan khusus yang berfokus pada pembinaan perilaku dan penyesuaian sosial anak.

Tunagrahita

Intervensi berupa terapi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak.

Tunanetra

Pendekatan intervensi disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk penggunaan media dan metode pembelajaran yang mendukung keterbatasan penglihatan.

Tunadaksa

Intervensi diberikan melalui layanan pendidikan khusus yang mendukung keterbatasan fisik anak.

Tunaganda

Penanganan dilakukan melalui layanan pendidikan khusus yang komprehensif, di mana guru dan orang tua berperan dalam memberikan berbagai terapi, seperti terapi bicara, terapi bahasa, dan terapi fisik sesuai kebutuhan anak

SIMPULAN

Sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi. Perkembangannya telah berubah dari sistem terpisah (segregasi), ke integrasi, hingga menuju pendidikan inklusi yang memungkinkan semua anak belajar bersama sesuai kebutuhannya. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusi masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman guru, keterbatasan fasilitas, dan kebijakan yang belum berjalan maksimal. Hal ini membuat kebutuhan belajar ABK belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, intervensi sangat penting untuk mendukung perkembangan ABK. Intervensi harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, baik melalui terapi, metode belajar, maupun dukungan sosial dan emosional. Tanpa intervensi yang tepat, perkembangan anak bisa terhambat. Sebaliknya, intervensi yang sesuai dapat membantu anak berkembang lebih optimal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, perlu upaya menyeluruh untuk meningkatkan pendidikan dan intervensi bagi ABK, seperti meningkatkan kemampuan guru, menyediakan fasilitas yang memadai, dan memperkuat kebijakan pendidikan inklusi. Dukungan dari pemerintah, guru, keluarga, dan masyarakat sangat penting agar ABK dapat berkembang, mandiri, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial.

REFERENSI

- Aditama, W. B. (2025). *Telaah Implementasi Pembelajaran dan Solusi bagi Peserta Didik Lamban Belajar (Slow Learner) di Sekolah Inklusi*. 05(01), 104–120.
- Akbar, A., Utami, T., Pauziah, P., Andriani, O., Muhammadiyah, U., & Bungo, M. (2024). *Pendidikan Segregasi , Integrasi Dan Inklusi*. 2(2), 54–61.
- Amalia, P., & Nadirah, Y. F. (2025). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi ABK Tunalaras/Gangguan Emosi dan Perilaku di SKH Elmyra Shanum*. 11(4), 425–434.
- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Payung, L. T., & Heri, A. (2025). *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia : Pendekatan CIPP dan Perspektif Keadilan Sosial*. 0738(3), 739–750.
- Arviana, A., Winta, M. V. I., & Pratiwi, S. (2025). *Pengajaran Guru terhadap Keterampilan Emosial ABK di Bunga Bangsa Universal School melalui Dukungan Orang Tua*. 5(September), 871–889.
- Damanik, M. Z., Irhamsyah, T., & Anjarwati. (2025). *Jenis-jenis Anak Berkebutuhan (ABK) I: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, dan Tunawicara*. 5(1), 1–11.
- Damayanti, N., Rahayu, D., Langgut, M. F. De, Tito, J., & Romiaty, R. (2025). *Mengenal Slow Learner: Tantangan dan Strategi Pembelajaran*. 1(2), 72–80.
- Daud, A. M. (2025). *Sistem Informasi Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus Pada Sekolah Luar Biasa Kota Tidore Kepulauan*. 4(1), 17–23.
- Dewi, S. K., & Sartinah, E. P. (2023). *Layanan Bimbingan Konseling Karir Siswa Tunadaksa Kelas XI di SLB Samudra Lavender Kabupaten Bangkalan*. 3(2), 80–83.
- Fau, J. F., Mendrofa, K. J., Wau, M., & Waruwu, Y. (2023). *Pendidikan Jendela Dunia*. 04(02), 69–77.
- Ginting, R. L., Yanti, A., Siburian, K., & Sianturi, T. E. (2023). *Bimbingan Konseling Bagi Anak Cerdas Istimewa Dan Kesulitan Belajar (Disleksia , Disgrafia , Diskalkulia)*. 1(6), 134–145.
- Hamza, M., Mahelatu, A. R., & Rajaa, Z. G. (2025). *Hak memperoleh pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa*. 11(2), 217–227.
- Hasbi, M., Lianty, L., Nawangsari, N. A. F., Pujiastuti, H., & Rosita, W. (2019). *Mengenal Bentuk Intervensi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Paud Inklusif*.
- Hidayat, R., Ulfatmi, Afnibar, & Kenedi, G. (2023). *Konseling Anak Berkebutuhan Khusus*. 3(3), 83–89.
- Lestari, T. D. (2025). *Pendekatan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. 2(1), 106–117.
- Makane, N. G., Atakama, R. P., Maulau, N. W., Kamalau, O., Dony, P. M. T., Mata, Y., & Fandpada, N. (2025). *Bimbingan Bagi Anak Cerdas dan Berbakat di Kelas VI SD GMT 03 Kalabahi*. 2(10), 363–370.
- Mardiansah, Ramadhan, R. A., & Suryani, R. (2024). *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus dan Klasifikasinya*. 5(1).
- Meidiana, T., Nasution, A. S., & Sumirda, N. (2025). *Analisis Penerapan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita di Rumah Terapi Tabina*. 8(1), 1–4.
- Nugraheni, B. S. D., & Pudjiastuti, E. (2023). *Meningkatkan Minat Bekerja Anak Tunarungu Melalui Bimbingan Konseling*. 3(2), 77–79.
- Pradana, T. A., & Susilawati. (2023). *Strategi Intervensi Layanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. 6(2), 27–33.

- Saputra, A., Steven, Z., Renaldi, Sihotang, I. H., & Romiaty, R. (2025). *Malnutrisi pada anak usia dini*. 5(2), 108–114.
- Setiyani, N., Oktasiana, E. T., Azami, F., & Nisrina, H. S. (2024). *Konseling Behavioral dengan Teknik Reinforcement dan Punishment dalam Meningkatkan Kepatuhan Anak Autisme Spectrum Disorder di PAUD Inklusi Sidoarjo*. 14(1), 45–56.
- Sianturi, N. P., Paulus, J. T., Takasihaeng, M. L. P., Teleng, M., Bowontari, N. F., & Katiandagho, P. A. (2024). *Cahaya Dalam Kegelapan : Dukungan Spiritual Dan Emosional Melalui Konseling*. 1(2), 1–13.
- Ulfah, S. M. (2024). *Tantangan dan Strategi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. 3(2), 12–30.
- Wulandari, S. K., Afifah, J., Yasmin, A. R., Saripah, & Hamidah, S. (2025). *Analisis Potensi Anak Tunawicara Dalam Keterbatasan Berinteraksi di Masyarakat*. 10(1), 9–16.